
**HUBUNGAN TINGKAT URBANISASI DAN TINGKAT KETIMPANGAN WILAYAH
DI DAERAH PANTURA JAWA TENGAH**

Hendra Saputra¹ dan Sri Rahayu²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

email : hendra13saputra@gmail.com

Abstrak: *Urbanisasi dan ketimpangan wilayah merupakan dua hal penting yang sedang dihadapi oleh negara berkembang. Urbanisasi yang dialami Amerika selama 90 tahun, dialami oleh Korea selama 20 tahun dan Brazil selama 30 tahun. Sekitar 70% dari negara yang mengalami urbanisasi mempunyai pendapatan perkapita yang berbeda-beda. Hal tersebut juga terindikasi pada daerah Pantura Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah tahun 2011, sebesar 11,53% penduduk di daerah Pantura Jawa Tengah berada di Kota Semarang dan pendapatan perkapita daerah Pantura Jawa Tengah sangat mencolok pada Kabupaten Kudus (Rp. 42.941.164,-) dan Kota Semarang (Rp. 30.566.980,-) dibandingkan dengan wilayah lain yang mempunyai proporsi dibawah Rp. 15.000.000,- terhadap pendapatan perkapita daerah Pantura Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data Badan Pusat Statistik tahun 2006 dan 2011. Analisis metode nilai entropi digunakan untuk menghitung tingkat urbanisasi, sedangkan tingkat ketimpangan wilayah menggunakan koefisien Theil. Tingkat urbanisasi di daerah Pantura Jawa Tengah mengalami peningkatan sedangkan tingkat ketimpangan wilayahnya mengalami penurunan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2006. Hubungan antara tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah berbanding lurus yang dapat dilihat pada Kota Semarang dan Kabupaten Rembang. Hal ini berarti jika tingkat urbanisasi tinggi maka tingkat ketimpangan wilayah juga akan tinggi dan begitu juga sebaliknya.*

Kata kunci : *Hubungan, Urbanisasi, Ketimpangan Wilayah, Pantura Jawa Tengah*

Abstract: *Urbanization and regional inequality are two important things that should be faced by developing country. In America urbanization occurs for 90 years, Korea had been through urbanization for 20 years and Brazil had been through it for 30 years. Around 70% of countries that had been through the urbanization have difference income per capita. It is also indicated on the northern coast area of Central Java. Based on data from Statistic Central Agency of Central Java year of 2011, around 11,53% population of the northern coast area of Central Java live in Semarang City. There are a huge ratio of income per capita proportion of the northern coast area of Central Java, between Kudus Regency (Rp. 42.941.164,-), Semarang City (Rp. 30.566.980,-), and the other regions under Rp. 15.000.000,-. The purpose of this study was to determine the relation between urbanization level and regional inequality level in the northern coast area of Central Java. This study uses a quantitative research approach and uses secondary data from Statistic Central Agency of Central Java year of 2006 and 2011. Entropy analysis method is used for counting urbanization level, while theil coefficient is used for counting regional inequality level. Urbanization level in the northern coast area of Central Java increases, while regional inequality level decreases in the year of 2011 which is compared by its condition in the years of 2006. The relationship between urbanization level and regional inequality level in the northern coast area of Central Java is directly proportional, as can be*

seen in Semarang City and Rembang Regency. It means that if urbanization level is high, so does the inequality region level and if urbanization level is low, so does the inequality region level.

Keyword : Relationship, Urbanization, regional inequality, the northern coast area of Central Java.

PENDAHULUAN

Urbanisasi dan ketimpangan wilayah merupakan dua hal penting yang sedang dihadapi oleh negara-negara berkembang. USA mengalami urbanisasi sebesar 40% di tahun 1990, 70% di tahun 1960 dan di atas 75% di tahun 1990 sedangkan di negara-negara berkembang, misalnya Republik Korea mengalami urbanisasi sebesar 40% di tahun 1970 dan 78% di tahun 1990. Urbanisasi yang dialami Amerika selama 90 tahun, dialami oleh Korea selama 20 tahun dan Brazil selama 30 tahun (Henderson, 2002).

Lebih dari setengah dari populasi dunia saat ini terdiri dari penduduk kota dan proporsi ini diprediksi meningkat menjadi lebih dari dua pertiga pada tahun 2030 dengan puncak di Afrika dan Asia (PBB, 1996 dalam Esch et al, 2014). Pada tahun 2010, populasi dunia yang tinggal di daerah perkotaan merupakan 52% dari total penduduk (Bank Dunia, 2012 dalam Wan et al, 2015).

Henderson (2002) menyebutkan sekitar 70% dari berbagai negara yang mengalami urbanisasi mempunyai pendapatan perkapita yang berbeda-beda. Williamson (1965) dalam Henderson (2002) menambahkan pada negara berkembang, konsentrasi perkotaan meningkat pada tahapan awal dari pengembangan ekonomi sebagai bagian dari peningkatan ketimpangan wilayah.

McKay (2002) mengatakan banyak contoh membuktikan ketimpangan dalam dan diantara negara-negara. Pada tahun 2000 negara terkaya di dunia (Luksemburg) menikmati tingkat pendapatan nasional bruto perkapita lebih dari 90 kali dari yang paling miskin (Sierra Leone). Pada tahun 1998 tingkat konsumsi rata-rata dari 10% orang terkaya dari Zambia adalah 37 kali dari 10% orang-orang termiskin. Semakin banyak bukti bahwa ketimpangan wilayah (setidaknya) dalam dan

diantara negara-negara telah meningkat selama dua dekade terakhir.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji hubungan tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah. Letaknya yang berada di bagian tengah Pulau Jawa menjadikan daerah Pantura Jawa Tengah jembatan penghubung antara daerah bagian barat dan bagian timur Pulau Jawa. Indikasi terjadinya urbanisasi di daerah Pantura Jawa Tengah dapat dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah yaitu pada tahun 2013, rumah tangga usaha pertanian di daerah Pantura Jawa Tengah berjumlah 1.349.794 rumah tangga atau berkurang sekitar 34,17% dibandingkan pada tahun 2003 yang berjumlah 2.050.500 rumah tangga. Penurunan rata-rata rumah tangga usaha pertanian di daerah Pantura Jawa Tengah yaitu sebesar 7,14%.

Sedangkan indikasi terjadinya ketimpangan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah yaitu dapat dilihat bahwa Kabupaten Kudus (Rp. 42.941.164,-) memiliki nilai pendapatan perkapita tertinggi kemudian diikuti oleh Kota Semarang (Rp. 30.566.980,-), sedangkan di sisi lain sebagian besar daerah Pantura Jawa Tengah mempunyai pendapatan perkapita dibawah Rp. 15.000.000,- terhadap pendapatan perkapita seluruh daerah Pantura Jawa Tengah.

Konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi di daerah Pantura Jawa Tengah masih terpusat di Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari 11,53% penduduk di daerah Pantura Jawa Tengah berada di Kota Semarang dengan kepadatan penduduk 6.981,07 jiwa/km². Begitu juga dengan proporsi penduduk nonpertanian Kota Semarang yang sudah mencapai 96% pada tahun 2011.



Sumber: Hasil Olahan Penyusun, 2015

GAMBAR 1
DAERAH PANTURA JAWA TENGAH

Kota Semarang dengan statusnya sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah menjadi daya tarik kegiatan perekonomian terutama sektor industri. Pada tahun 2011, proporsi nilai sektor industri sekunder dan tersier mencapai 98% dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata dari tahun 2006-2011 sebesar 5,84% yang merupakan paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di daerah Pantura Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa terpusatnya kegiatan ekonomi di Kota Semarang menyebabkan terjadinya ketimpangan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah. Daerah Pantura Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.

Sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Li dan Wei (2010), kota merupakan komponen penting yang menyebabkan ketimpangan yang cukup besar antardaerah di Cina dengan distribusi spasial dari kota adalah salah satu alasan untuk ketimpangan wilayah yang serius sejak tiga kota terkaya (Beijing, Shanghai, dan Tianjin) terletak di wilayah timur Cina. Selain itu, kota telah memainkan peran penting dalam perubahan pola ketimpangan wilayah. Efek kota adalah contoh bagaimana kekuatan ini telah didorong pertumbuhan regional karena kota memiliki kebijakan yang lebih preferensial dari pemerintah pusat, otonomi daerah yang lebih tinggi, dan dapat menarik lebih banyak investasi asing.

KAJIAN LITERATUR Urbanisasi

Urbanisasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *urbanization* dengan asal kata urban yang merupakan kata sifat dan berarti bersifat kekotaan sehingga mempunyai makna secara harfiah suatu proses menjadi bersifat kekotaan. Menurut Yunus (2006) urbanisasi adalah proses menjadi sifat kekotaan baik perubahan dari sifat bukan kekotaan (kedsaan) menjadi kekotaan atau perubahan tingkat kekotaan yang lebih rendah menjadi tingkat kekotaan yang lebih tinggi. Ahrné, Bengtsson dan Elmquist (2009) menyebutkan bahwa urbanisasi adalah suatu proses yang melibatkan perubahan dramatis dan terus-menerus yang meningkatkan jumlah daerah terbangun sekaligus mengurangi jumlah daerah hijau.

Dalam kasus kebanyakan, makna tersirat dari urbanisasi salah satunya konsentrasi penduduk. Hal ini berdasarkan pendapat Tisdale (1942) yang mengatakan urbanisasi adalah proses dari konsentrasi penduduk. Proses tersebut terjadi dalam dua cara yaitu penggandaan titik konsentrasi dan peningkatan dalam ukuran konsentrasi individu. Coulumbe (2000) menggunakan penduduk perkotaan yaitu penduduk yang tinggal dalam sensus daerah metropolitan dan sensus aglomerasi di atas 10.000 penduduk sebagai tingkat urbanisasi. Sedangkan Hsieh (2014) mengatakan urbanisasi adalah peningkatan proporsi penduduk suatu negara yang berada di daerah perkotaan, di mana ukuran kota tidak dipertimbangkan, sedangkan secara eksogen pertumbuhan kota adalah peningkatan jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan.

Menurut Gibbs (1966), skala urbanisasi didefinisikan sebagai $\sum XY$ dimana X adalah proporsi penduduk perkotaan dalam unit diatas ukuran tertentu (contohnya diatas 4.999) dan Y adalah proporsi dari total penduduk dalam satuan yang sama. Mcgee (1971:10) juga menyatakan bahwa secara umum ukuran produk akhir dari proses tingkat

urbanisasi adalah proporsi dari tingkat penduduk perkotaan dalam suatu kota. Begitu juga dengan Bruckner (2012) dalam mengukur tingkat urbanisasi berdasarkan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Pendapat berbeda disampaikan oleh Wan et al (2007) bahwa urbanisasi dihitung berdasarkan proporsi penduduk nonpertanian. Secara umum, tingkat urbanisasi didefinisikan berdasarkan demografi umum karena mudah untuk menghitung dan menafsirkan serta ketersediaan data yang tinggi (Hsieh, 2014).

Wang et al (2014) dalam menghitung tingkat urbanisasi menemukan bahwa demografi merupakan kontribusi paling besar dalam tingkat urbanisasi yang komprehensif pada level subsistem. Kemudian dari subsistem pada sistem koefisien urbanisasi yang komprehensif, persentase penduduk nonpertanian, kepadatan penduduk perkotaan, proporsi daerah yang dibangun di daerah perkotaan, dan total aset investasi tetap per 1000 orang merupakan empat indikator dampak yang memiliki kontribusi paling besar. Koefisien sistem dari tingkat urbanisasi Wang et al (2014) dapat dilihat pada Tabel 1.

TABEL 1
SISTEM INDEKS KOMPREHENSIF DARI
SUBSISTEM URBANISASI

No	Indeks Kelas Pertama	Indeks Dasar Kelas
1.	Urbanisasi Demografi	Persentase penduduk nonpertanian
		Persentase lapangan kerja industri tersier
		Kepadatan penduduk perkotaan
2.	Urbanisasi Spasial	Proporsi daerah terbangun di daerah perkotaan
		Kepadatan jaringan transit
		Persentase daerah terbangun pada total area lahan
3.	Urbanisasi Ekonomi	Proporsi nilai tambah dari industri sekunder dan tersier terhadap PDRB
		Pendapatan perkapita
		Nilai output industri bruto perkapita
		Pendapatan fiskal lokal perkapita

4.	Urbanisasi Sosial	Total investasi aset tetap
		Total penjualan ritel barang konsumsi perkapita
		Tingkat konsumsi penduduk perkapita
		Jumlah telepon per 10.000 rumah tangga
		Jumlah pengguna internet per 10.000 orang
		Jumlah dokter per 10.000 orang
		Pendapatan penduduk perkotaan perkapita

Sumber : Wang et al, 2014

Wan et al (2015) dalam menghitung tingkat urbanisasi di Huaibei memilih empat indikator tingkat pertama yaitu urbanisasi lanskap, urbanisasi penduduk, urbanisasi ekonomi dan gaya hidup urbanisasi, dan 16 indikator sekunder untuk mengevaluasi tingkat dan kualitas urbanisasi di Huaibei berdasarkan Li dan Li (2005). Misalnya, urbanisasi penduduk (indikator tingkat pertama) selanjutnya dapat diukur melalui proporsi penduduk nonpertanian, tingkat pertumbuhan alami penduduk, penduduk perkotaan, dan kepadatan penduduk perkotaan.

Kemudian, empat indikator tingkat kedua (pendapatan perkapita, pendapatan keuangan daerah per apita, rata-rata upah dari bekerja, dan proporsi nilai output industri sekunder dan tersier dalam PDRB) secara komprehensif menjelaskan dimensi urbanisasi ekonomi (indikator tingkat pertama). Indikator-indikator ini ditunjukkan pada Tabel II.

TABEL II
INDIKATOR-INDIKATOR TINGKAT
URBANISASI DI HUAIBEI

Target	Faktor	Indeks Dasar Kelas
Urbanisasi Komprehensif	Urbanisasi penduduk	Proporsi penduduk nonpertanian
		Tingkat pertumbuhan alami penduduk
		Penduduk perkotaan
		Kepadatan penduduk perkotaan

	Urbanisasi ekonomi	Pendapatan perkapita
		pendapatan keuangan daerah perkapita
		Rata-rata upah dari bekerja
		Proporsi nilai output industri sekunder dan tersier dari PDRB
	Urbanisasi lanskap	Daerah taman hijau perkapita
		Cakupan penghijauan di wilayah terbangun
		Proporsi lahan konstruksi
		Daerah jalan perkotaan perkapita
	Urbanisasi gaya hidup	Pendapatan perkapita perkotaan
		Jumlah tempat tidur rumah sakit per 10.000 orang
		Daerah tempat tinggal perkapita
		Konsumsi listrik hunian perkapita

Sumber : Wan et al, 2015

Wan et al (2015) menemukan tingkat komprehensif urbanisasi kota di Huaibei terus meningkat dan terjadi peningkatan 18 kali lipat dalam 22 tahun. Dari pandangan tingkat urbanisasi tunggal, tingkat urbanisasi penduduk meningkat dengan pertumbuhan 2,3 kali lipat. Tingkat urbanisasi ekonomi mengalami peningkatan 91 kali lipat. Urbanisasi lingkungan lanskap dan gaya hidup urbanisasi naik sebesar 24 kali lipat dan 58 kali lipat. Tingkat urbanisasi ekonomi telah berkembang paling cepat di Huaibei, urbanisasi gaya hidup peringkat kedua sedangkan pengembangan tingkat urbanisasi lainnya relatif stabil di tahun-tahun studi. Secara umum, urbanisasi penduduk, urbanisasi ekonomi, urbanisasi lanskap lingkungan dan urbanisasi gaya hidup bersama-sama mempromosikan urbanisasi yang komprehensif untuk berkembang di jalur cepat

Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan wilayah merupakan masalah penting dari kebijakan pemerintah (Wei, 2002 dalam Li dan Wei, 2010). Ketimpangan menurut Mykay (2002) yaitu menyangkut variasi dalam standar hidup di seluruh penduduk salah satunya dapat berkaitan dengan posisi relatif individu yang berbeda (atau rumah tangga) dalam distribusi. Sedangkan ketimpangan wilayah menurut Dunford (2009) digunakan untuk merujuk pada perbedaan dalam kualitas hidup, kekayaan dan standar hidup orang yang hidup dan bekerja di tempat yang berbeda yang menekankan pada perbedaan kesejahteraan manusia dan aspek-aspek terkait kehidupan regional. Ketimpangan wilayah berkaitan erat dengan berbagai indikator yang mewakili kekayaan, pendapatan, pekerjaan, harapan hidup, kesehatan dan pendidikan penduduk di tempat yang berbeda.

Menurut Sjafrizal (2008:104), ketimpangan wilayah adalah kondisi suatu daerah yang disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah sangat mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Pada akhirnya kegiatan produksi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat pada daerah yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang tinggi dibandingkan dengan daerah dengan sumber daya alam yang lebih rendah.

Sedangkan kondisi demografis akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Kondisi demografis yang dimaksud yaitu perbedaan tingkat pertumbuhan, struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan, tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang

dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Perbedaan faktor-faktor tersebut memberikan kondisi dan kemajuan ekonomi yang berbeda pula pada setiap daerah. Syafrizal (2014:153) lebih lanjut menjelaskan bahwa kondisi dan kemajuan pembangunan wilayah dapat dilihat melalui penggunaan indikator pembangunan daerah yang terdiri dari indikator ekonomi daerah dan indikator kesejahteraan sosial. Indikator ekonomi daerah meliputi:

- a. Struktur Ekonomi Daerah
- b. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- c. Tingkat Kemakmuran Ekonomi Daerah
- d. Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)

Sedangkan indikator kesejahteraan sosial suatu wilayah dapat dilihat dari :

- a. Indeks Pembangunan Manusia
- b. Gini Ratio
- c. Tingkat Kemiskinan
- d. Tingkat Pengangguran

Hubungan Urbanisasi dan Ketimpangan Wilayah

Urbanisasi dan ketimpangan wilayah mempunyai hubungan yang sangat erat. Keterkaitan yang erat antara urbanisasi dan ketimpangan wilayah dijelaskan oleh Gilbert dan Gugler (1996:86) bahwa perkembangan ekonomi cenderung mendukung wilayah-wilayah geografis yang mencolok pada sistem ekonominya sehingga para penduduk berpindah dari wilayah-wilayah kritis ke wilayah-wilayah yang dinamis, dari pedesaan ke perkotaan, dari kota-kota kecil ke kota-kota besar yang menyebabkan penduduk terpusat secara spasial.

Hal ini sesuai dengan teori kutub pertumbuhan (growth pole theory) yang menjelaskan pertumbuhan tidak terjadi di setiap tata ruang, melainkan hanya terjadi pada beberapa tata ruang tertentu yang memiliki industri pendorong (propulsive industry) yaitu industri besar, bermodal besar, memiliki daya tarik dan daya sebar yang kuat dan memiliki produktivitas yang tinggi. Wilayah-wilayah dan kota-kota tertentu lebih

mampu menarik aktivitas ekonomi dan penduduk daripada wilayah-wilayah dan kota-kota lainnya. Terdapat kecenderungan yang jelas terkait konsentrasi sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan beberapa sektor ekonomi lainnya di wilayah-wilayah tertentu. Beberapa wilayah tertentu bersifat dinamis, sementara wilayah-wilayah yang lain tumbuh lambat atau bahkan menurun.

Terkait dengan kecenderungan ini penduduk menjadi lebih terpusat secara spasial, para penduduk berpindah dari wilayah-wilayah kritis ke wilayah-wilayah yang dinamis, dari pedesaan ke perkotaan, dari kota-kota kecil ke kota-kota besar. Wan et al (2007) menambahkan urbanisasi yang berbeda dari daerah ke daerah menyebabkan perbedaan-perbedaan yang mempengaruhi pendapatan perkapita daerah dan kemudian ketimpangan wilayah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survei. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu kajian literatur terhadap teori, buku, jurnal dan artikel dan survei instansional Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dengan data tahun 2006 dan 2011.

Tingkat urbanisasi dilihat dari urbanisasi demografi (proporsi penduduk perkotaan, kepadatan penduduk perkotaan, proporsi penduduk nonpertanian, dan persentase lapangan kerja industri tersier), urbanisasi spasial (persentase daerah terbangun pada total area lahan, daerah lahan hijau perkapita, jalan perkapita dan kepadatan jalan), urbanisasi ekonomi (pendapatan perkapita, pendapatan keuangan daerah perkapita, pendapatan fiskal lokal perkapita, total investasi aset tetap, rata-rata upah dari bekerja, nilai output industri bruto perkapita dan proporsi nilai output industri sekunder dan tersier dari PDRB) dan urbanisasi sosial (tingkat konsumsi penduduk perkapita, total

penjualan ritel barang konsumsi perkapita, tempat tinggal perkapita, jumlah dokter per 10.000 orang, jumlah tempat tidur rumah sakit per 10.000 orang dan konsumsi listrik hunian perkapita).

Adapun tingkat ketimpangan wilayah dilihat dari sumber daya alam (proporsi sektor pertanian, proporsi sektor pertambangan dan galian, laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita) dan kondisi demografi (IPM, gini rasio, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran).

Analisis yang digunakan untuk menganalisis tingkat urbanisasi di daerah Pantura Jawa Tengah adalah analisis metode nilai entropi yang digunakan oleh Wanet al (2015). Analisis ini juga digunakan untuk menganalisis tingkat ketimpangan wilayah namun hanya melihat kontribusi tiap variabel dan indikator. Langkah-langkah analisis metode nilai entropi sebagai berikut.

a. Pilih indikator: x_{ij} adalah indikator j untuk tahun i. Sebagai contoh, x_{ij} adalah nilai indikator proporsi penduduk perkotaan Kota Semarang pada tahun 2006.

b. Standarisasi indikator:

$$X_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_{1j}, x_{2j} \dots x_{nj})}{\max(x_{1j}, x_{2j} \dots x_{nj}) - \min(x_{1j}, x_{2j} \dots x_{nj})}$$

X_{ij} adalah standarisasi indikator proporsi penduduk perkotaan Kota Semarang tahun 2006, $\min(x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{nj})$ adalah nilai terendah dari indikator proporsi penduduk perkotaan daerah Pantura Jawa Tengah tahun 2006 dan $\max(x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{nj})$ adalah nilai tertinggi dari indikator proporsi penduduk perkotaan daerah Pantura Jawa Tengah tahun 2006. Nilai X_{ij} berada pada rentang nilai 0 sampai 1 artinya nilai 0 merupakan nilai standarisasi indikator paling rendah sedangkan nilai 1 merupakan nilai standarisasi indikator paling tinggi.

c. Hitung proporsi indikator j yang dicatat pada tahun-i:

$$P_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sum_{i=1}^n X_{ij}} \quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m)$$

P_{ij} adalah proporsi indikator proporsi penduduk perkotaan Kota Semarang tahun 2006 dan $\sum X_{ij}$ adalah total standarisasi indikator proporsi penduduk perkotaan Daerah Pantura Jawa Tengah tahun 2006.

d. Hitung nilai entropi untuk indikator j:

$$e_j = -k \sum_{i=1}^n (P_{ij} \cdot \ln P_{ij}) \quad \text{dimana: } k > 0, k = 1/\ln(n), e_j \geq 0$$

e_j adalah nilai entropi indikator proporsi penduduk perkotaan Kota Semarang tahun 2006 dan n adalah jumlah wilayah yang berada di daerah Pantura Jawa Tengah yaitu sebanyak 14 kabupaten/kota. Sedangkan $\sum (P_{ij} \cdot \ln P_{ij})$ adalah jumlah nilai proporsi indikator proporsi penduduk perkotaan Kota Semarang tahun 2006 dikalikan dengan nilai ln dari nilai proporsi indikator proporsi penduduk perkotaan Kota Semarang tahun 2006. Nilai ini menunjukkan nilai untuk satu daerah Pantura Jawa Tengah tahun 2006. Nilai e_j proporsi penduduk perkotaan akan sama pada tiap wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah. Begitu juga untuk nilai e_j untuk indikator lainnya. Sedangkan nilai k akan sama untuk semua wilayah pada setiap indikator baik pada tahun 2006 dan 2011.

e. Hitung koefisien perbedaan untuk indikator j:

$$g_j = \frac{1 - e_j}{m - E_e} \quad \text{dimana } E_e = \sum_{j=1}^m e_j, \quad 0 \leq g_j \leq 1$$

g_j adalah koefisien untuk indikator proporsi penduduk perkotaan Kota Semarang tahun

2006 dengan m adalah jumlah wilayah yang ada di daerah Pantura Jawa Tengah yaitu sebanyak 14 kabupaten/kota. E_e merupakan nilai entropi (e_j) indikator proporsi penduduk perkotaan daerah Pantura Jawa Tengah tahun 2006. Nilai entropi tiap daerah yang sama maka dikalikan sebanyak 14 kabupaten/kota menghasilkan nilai entropi (e_j) daerah Pantura Jawa Tengah tahun 2006. Nilai g_j akan sama pada tiap wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah. Begitu juga untuk nilai g_j untuk indikator lainnya baik tahun 2006 maupun 2011.

f. Menghitung nilai tertimbang:

$$W_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^m g_j} \quad (1 \leq j \leq m)$$

W_j merupakan nilai tertimbang indikator proporsi penduduk perkotaan Kota Semarang tahun 2006. $\sum g_j$ adalah koefisien untuk indikator proporsi penduduk perkotaan daerah Pantura Jawa Tengah tahun 2006. Nilai tertimbang tiap daerah yang sama maka dikalikan sebanyak 14 kabupaten/kota menghasilkan nilai tertimbang (g_j) daerah Pantura Jawa Tengah tahun 2006. Nilai W_j akan sama pada tiap wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah. Begitu juga untuk nilai W_j untuk indikator lainnya baik tahun 2006 maupun 2011.

g. Menghitung tingkat komprehensif untuk setiap tahun:

$$S_i = \sum_{j=1}^m (W_j \cdot P_{ij}) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

Nilai komprehensif indikator proporsi penduduk perkotaan Kota Semarang tahun 2006 dihitung dengan mengalikan nilai W_j merupakan nilai tertimbang indikator proporsi penduduk perkotaan Kota Semarang tahun 2006 dengan P_{ij} yang merupakan proporsi indikator proporsi penduduk perkotaan Kota Semarang tahun 2006. S_i merupakan nilai komprehensif indikator proporsi penduduk

perkotaan daerah Pantura Jawa Tengah tahun 2006 yang didapat dari penjumlahan nilai komprehensif indikator proporsi penduduk perkotaan tiap wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah tahun 2006. Nilai komprehensif indikator lain pada tahun 2006 dan 2011 juga dihitung dengan cara yang sama yang telah dijelaskan.

Nilai urbanisasi demografi daerah Pantura Jawa Tengah dihitung dengan menjumlahkan nilai komprehensif tiap wilayah dari setiap indikator urbanisasi demografi (proporsi penduduk perkotaan, kepadatan penduduk perkotaan, proporsi penduduk nonpertanian dan persentase lapangan kerja industri tersier). Hal yang sama juga dilakukan untuk menghitung nilai urbanisasi spasial, ekonomi dan sosial. Sedangkan nilai tingkat urbanisasi komprehensif dihitung dengan menjumlahkan nilai urbanisasi demografi, spasial, ekonomi dan sosial.

Untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah juga menggunakan koefisien Theil yang digunakan Novotny (2007) yang dapat ditulis sebagai berikut.

$$T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{y} \ln \frac{y_i}{y}$$

dimana T menunjukkan ketimpangan wilayah secara keseluruhan, n adalah ukuran populasi (jumlah wilayah), y merupakan pendapatan perkapita rata-rata Daerah Pantura, dan y_i adalah pendapatan perkapita wilayah i di daerah Pantura Jawa Tengah. Jika populasi secara teritorial dapat dibagi menjadi k daerah, maka T dapat diperinci sebagai:

$$T = \left(\sum_{j=1}^k \frac{n_j y_j}{n y} \ln \frac{y_j}{y} \right) + \left(\sum_{j=1}^k \frac{1}{n} \frac{y_j}{y} \sum_{i=1}^{n_j} \frac{y_{ij}}{y_j} \ln \frac{y_{ij}}{y_j} \right) = B + W$$

dimana n_j mengacu pada ukuran populasi (jumlah wilayah) region j pada daerah Pantura Jawa Tengah, y_j adalah pendapatan perkapita rata-rata region j pada daerah Pantura Jawa

Tengah, dan yij merupakan pendapatan perkapita wilayah i pada region j daerah Pantura Jawa Tengah. Nilai pendapatan perkapita dihitung dengan harga berlaku (Syafrizal, 2014:153).

Hubungan antara tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah dapat dilihat dengan cara mengelompokkan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah berdasarkan tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayahnya. Nilai tingkat urbanisasi yang digunakan yaitu nilai dari analisis metode nilai entropi dan nilai tingkat ketimpangan wilayah yang digunakan yaitu nilai koefisien Theilyang dapat dilihat pada Tabel III.

TABEL III
HUBUNGAN TINGKAT URBANISASI DAN
TINGKAT KETIMPANGAN WILAYAH
DI DAERAH PANTURA JAWA TENGAH

Tingkat Ketimpangan Wilayah	Tingkat Ketimpangan Wilayah di atas rata-rata	Tingkat Ketimpangan Wilayah di bawah rata- rata
Tingkat Urbanisasi	Kuadran I	Kuadran II
Tingkat Urbanisasi di atas rata-rata	Kuadran III	Kuadran IV
Tingkat Urbanisasi di bawah rata- rata		

Sumber : Modifikasi Tipologi Klassen, 2015

Daerah pada kuadran I merupakan daerah dengan nilai tingkat urbanisasi dan nilai tingkat ketimpangan wilayah yang berada di atas rata-rata. Daerah pada kuadran II merupakan daerah dengan nilai tingkat urbanisasi di atas rata-rata dan nilai tingkat ketimpangan wilayah di bawah rata-rata dan daerah pada kuadran III merupakan daerah dengan nilai tingkat urbanisasi di bawah rata-rata dan nilai tingkat ketimpangan wilayah di atas rata-rata. Sedangkan daerah pada kuadran IV berarti mempunyai nilai tingkat

urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah di bawah rata-rata.

Mcgee (1971:20) menyatakan model pertumbuhan ekonomi berdasarkan sejarah pertumbuhan ekonomi di dunia kapitalis yang maju menunjukkan perkembangan ekonomi bersamaan dengan proses urbanisasi. Williamson (1965) dalam Henderson (2002) menambahkan pada negara berkembang, konsentrasi perkotaan meningkat pada tahapan awal dari pengembangan ekonomi sebagai bagian dari peningkatan ketimpangan wilayah. Henderson (2002) juga menyebutkan sekitar 70% dari berbagai negara yang mengalami urbanisasi mempunyai pendapatan perkapita yang berbeda-beda.

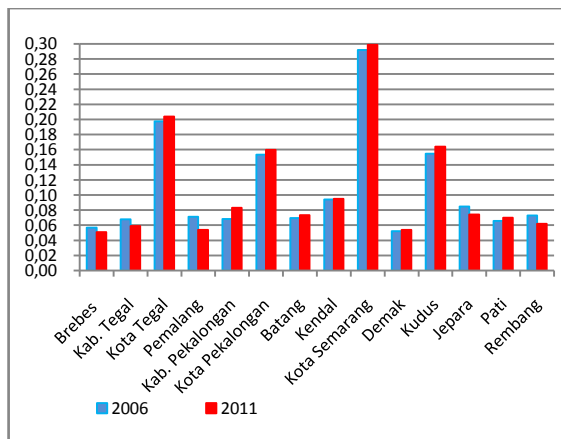
Jadi dapat diajukan suatu hipotesis bahwa hubungan antara tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah berbanding lurus. Jika suatu wilayah mempunyai nilai tingkat urbanisasi yang tinggi, maka ketimpangan wilayahnya juga tinggi dan jika suatu wilayah mempunyai nilai tingkat urbanisasi yang rendah, maka ketimpangan wilayahnya juga rendah yang dapat dilihat jika wilayah berada pada kuadran I dan kuadran IV. Sedangkan jika suatu wilayah berada pada kuadran II dan kuadran III, maka hubungan tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah berbanding terbalik dan tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

HASIL PENELITIAN

Analisis Tingkat Urbanisasi

Hasil metode nilai entropi tingkat urbanisasi daerah Pantura Jawa Tengah yang mempunyai nilai di atas rata-rata (0,10714) yaitu Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Semarang dan Kabupaten Kudus baik pada tahun 2006 maupun pada tahun 2011. Hasil metode nilai entropi tingkat urbanisasi paling tinggi pada tahun 2006 terjadi pada Kota Semarang dengan nilai sebesar 0,29169, sedangkan hasil metode nilai entropi tingkat urbanisasi paling rendah terjadi pada Kabupaten Demak sebesar 0,05206.

Hasil metode nilai entropi tingkat urbanisasi paling tinggi pada tahun 2011 juga terjadi pada Kota Semarang yang mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 0,29856, sedangkan hasil metode nilai entropi tingkat urbanisasi paling rendah terjadi pada Kabupaten Brebes dengan nilai 0,05074.



Sumber : Hasil analisis, 2015

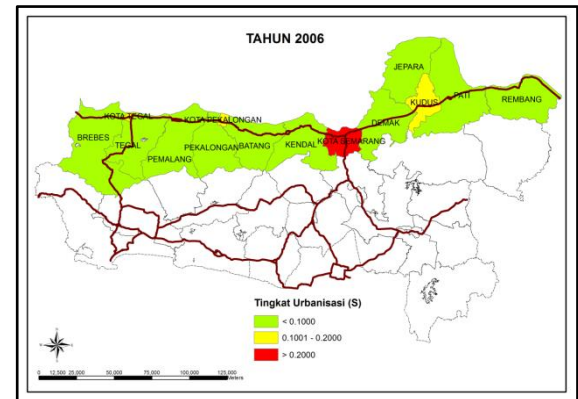
GAMBAR 2

GRAFIK METODE NILAI ENTRAPI TINGKAT URBANISASI DAERAH PANTURA JAWA TENGAH

Kota Semarang mempunyai hasil metode nilai entropi tingkat urbanisasi 5 kali lipat lebih tinggi dari Kabupaten Demak dan Kabupaten Brebes sebagai daerah dengan hasil metode nilai entropi tingkat urbanisasi paling rendah. Pada tahun 2006, Kota Tegal dan Kota Pekalongan mempunyai nilai urbanisasi demografi paling tinggi dibandingkan urbanisasi lainnya. Kabupaten Rembang mempunyai nilai urbanisasi spasial paling tinggi. Sedangkan Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara mempunyai nilai urbanisasi ekonomi paling tinggi. Adapun Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Pati mempunyai nilai urbanisasi sosial paling tinggi.

Pada tahun 2011, Kabupaten Tegal mengalami pergeseran dari urbanisasi sosial menjadi urbanisasi demografi dengan nilai paling tinggi. Adapun Kabupaten Pekalongan

mengalami pergeseran dari urbanisasi sosial menjadi urbanisasi ekonomi. Urbanisasi sosial merupakan urbanisasi yang paling banyak terjadi pada tahun 2006 yaitu sebanyak 7 wilayah, sedangkan pada tahun 2011 terdapat urbanisasi sosial dan urbanisasi ekonomi yang paling banyak terjadi di daerah Pantura Jawa Tengah yaitu sebanyak 5 wilayah.



Sumber : Hasil analisis, 2015

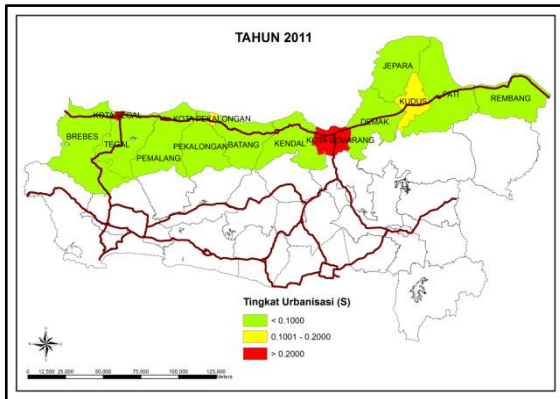
GAMBAR 3

PETA METODE NILAI ENTRAPI TINGKAT URBANISASI TAHUN 2006

Sebagian besar wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah pada tahun 2011 mengalami peningkatan tingkat urbanisasi dibandingkan pada tahun 2006 kecuali pada Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Rembang. Kabupaten Pemalang mengalami penurunan tingkat urbanisasi paling besar yaitu sebesar 0,01740, sedangkan peningkatan tingkat urbanisasi paling besar dialami oleh Kabupaten Pekalongan sebesar 0,01507 yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Pada tahun 2006, Sebagian besar daerah Pantura Jawa Tengah mempunyai nilai tingkat urbanisasi pada kategori <0,1000. Kota Tegal, Kota Pekalongan dan Kabupaten Kudus mempunyai nilai tingkat urbanisasi pada kategori 0,1000-0,2000. Sedangkan Kota Semarang berada pada kategori >0,2000. Pada tahun 2011, Kota Tegal mengalami pergeseran dari kategori 0,1000-0,2000 menjadi kategori

>0,2000 bersama dengan Kota Semarang yang dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.

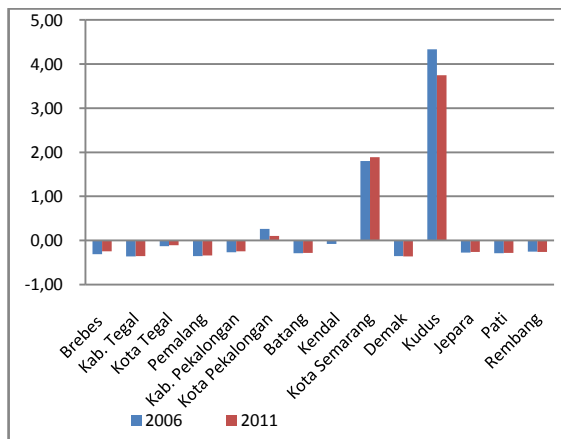


Sumber : Hasil analisis, 2015

GAMBAR 4
PETA METODE NILAI ENTROPY TINGKAT URBANISASI TAHUN 2011

Analisis Tingkat Ketimpangan Wilayah

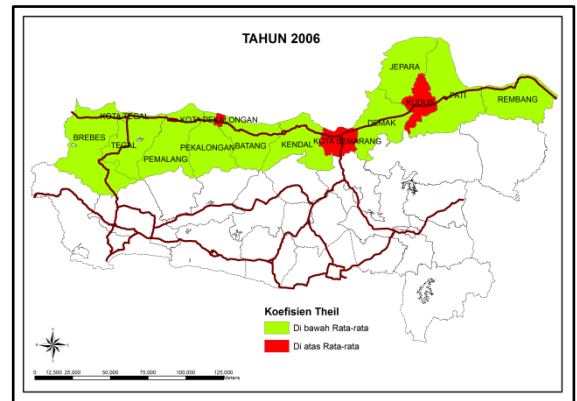
Berdasarkan analisis koefisien Theil, tingkat ketimpangan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah cenderung turun dari tahun 2006 sampai tahun 2011. Nilai koefisien Theil daerah Pantura Jawa Tengah pada tahun 2006 yaitu sebesar 0,24518 dan cenderung turun hingga pada tahun 2011 menjadi sebesar 0,21410.



Sumber : Hasil analisis, 2015

GAMBAR 5
GRAFIK NILAI KOEFISIEN THEIL DAERAH PANTURA JAWA TENGAH

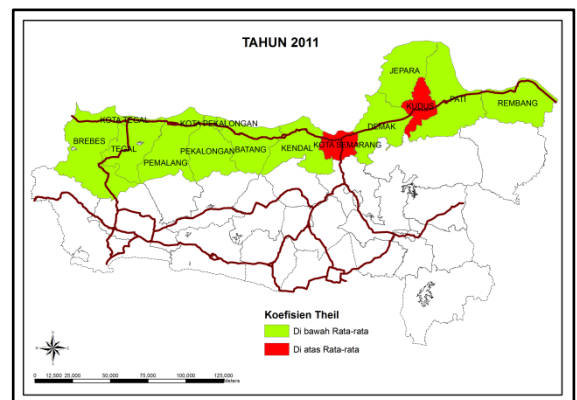
Nilai koefisien Theil paling tinggi yaitu pada Kabupaten Kudus dengan rata-rata 4,08393, Kota Semarang dengan rata-rata 1,86534 dan Kota Pekalongan dengan rata-rata 0,17459 yang bernilai positif dibandingkan wilayah lain di daerah Pantura Jawa Tengah mempunyai nilai koefisien Theil yang bernilai negatif.



Sumber : Hasil analisis, 2015

GAMBAR 6
PETA KOEFISIEN THEIL TAHUN 2006

Kabupaten Kudus, Kota Semarang dan Kota Pekalongan mempunyai nilai koefisien Theil di atas rata-rata daerah Pantura Jawa Tengah pada tahun 2006, sedangkan pada tahun 2007 sampai pada tahun 2011 hanya terdapat Kabupaten Kudus dan Kota Semarang dengan nilai koefisien Theil di atas rata-rata daerah Pantura Jawa Tengah.



Sumber : Hasil analisis, 2015

GAMBAR 7
PETA KOEFISIEN THEIL TAHUN 2011

Pada tahun 2011, sebagian besar wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah mengalami kenaikan nilai koefisien Theil dari tahun 2006. Wilayah-wilayah yang mengalami peningkatan nilai koefisien Theil yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati.

Sedangkan penurunan nilai koefisien Theil terjadi pada Kota Pekalongan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus mengalami penurunan nilai koefisien Theil paling tinggi yaitu sebesar 0,58870 yang dapat dilihat pada Gambar 5. Ketimpangan wilayah berdasarkan nilai koefisien Theil di daerah Pantura Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7.

Analisis Hubungan Tingkat Urbanisasi dan Tingkat Ketimpangan Wilayah

Hubungan antara tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah dapat dilihat dengan cara mengelompokkan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah berdasarkan tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayahnya. Nilai tingkat urbanisasi yang digunakan yaitu nilai dari analisis metode nilai entropi dan nilai tingkat ketimpangan wilayah yang digunakan yaitu nilai Koefisien Theil.

Pada tahun 2006 dan 2011, wilayah yang mempunyai nilai tingkat urbanisasi di atas rata-rata yaitu Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Semarang dan Kabupaten Kudus. Wilayah yang mempunyai nilai tingkat ketimpangan wilayah di atas rata-rata pada tahun 2006, yaitu Kota Pekalongan, Kota Semarang dan Kabupaten Kudus. Sedangkan pada tahun 2011, wilayah yang mempunyai nilai tingkat ketimpangan wilayah di atas rata-rata yaitu Kota Semarang dan Kabupaten Kudus.

Pada tahun 2006, terdapat 3 tipologi wilayah daerah Pantura Jawa Tengah yaitu wilayah Kuadran I, wilayah Kuadran II, dan wilayah Kuadran IV. Sebagian besar wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah berada pada Kuadran IV yang berarti mempunyai nilai tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah di bawah rata-rata. Pada Kuadran II, hanya terdapat Kota Tegal yang mempunyai nilai tingkat urbanisasi di atas rata-rata dan nilai tingkat ketimpangan wilayah di bawah rata-rata. Kota Pekalongan, Kota Semarang dan Kabupaten Kudus berada di Kuadran I yang berarti mempunyai nilai tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah di atas rata-rata yang dapat dilihat pada Tabel IV.

**TABEL IV
HUBUNGAN TINGKAT URBANISASI DAN
TINGKAT KETIMPANGAN WILAYAH
TAHUN 2006**

Tingkat Ketimpangan Wilayah / Tingkat Urbanisasi	Tingkat Ketimpangan Wilayah di atas rata-rata	Tingkat Ketimpangan Wilayah di bawah rata-rata
Tingkat Urbanisasi di atas rata-rata	Kuadran I Kota Pekalongan, Kota Semarang dan Kudus	Kuadran II Kota Tegal
Tingkat Urbanisasi di bawah rata-rata	Kuadran III -----	Kuadran IV Brebes, Kab. Tegal, Pemalang, Kab. Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Jepara, Pati, Rembang

Sumber : Hasil analisis, 2015

Pada tahun 2011, sebagian besar wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah tetap berada pada Kuadran IV yang berarti mempunyai nilai tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah di bawah rata-rata. Pada Kuadran II, hanya terdapat Kota Tegal dan Kota Pekalongan yang mempunyai nilai tingkat urbanisasi di atas rata-rata dan nilai tingkat ketimpangan wilayah di bawah rata-rata.

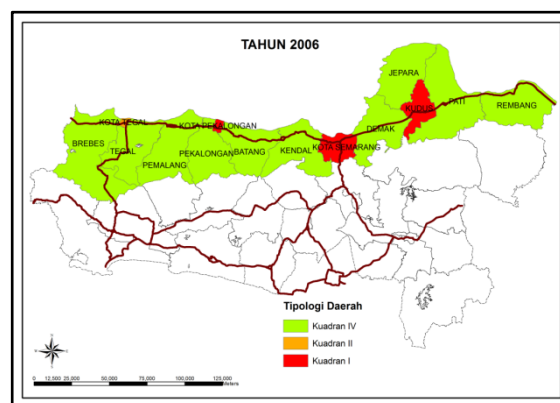
TABEL V
HUBUNGAN TINGKAT URBANISASI DAN
TINGKAT KETIMPANGAN WILAYAH
TAHUN 2011

Tingkat Ketimpangan Wilayah \ Tingkat Urbanisasi	Tingkat Ketimpangan Wilayah di atas rata-rata	Tingkat Ketimpangan Wilayah di bawah rata-rata
Tingkat Urbanisasi di atas rata-rata	Kuadran I Kota Semarang dan Kudus	Kuadran II Kota Pekalongan dan Kota Tegal
Tingkat Urbanisasi di bawah rata-rata	Kuadran III -----	Kuadran IV Brebes, Kab. Tegal, Pemalang, Kab. Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Jepara, Pati, Rembang

Sumber : Hasil analisis, 2015

Kota Pekalongan mengalami pergeseran dari Kuadran I pada tahun 2006 menjadi Kuadran II pada tahun 2011 yang diakibatkan oleh nilai tingkat ketimpangan wilayah yang mengalami penurunan sehingga berada di bawah rata-rata. Sedangkan Kota Semarang dan Kabupaten Kudus berada di Kuadran I yang berarti mempunyai nilai tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah di atas rata-rata yang dapat dilihat pada Tabel V. Tipologi daerah Pantura Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 8 dan Gambar 9.

Karakteristik wilayah tahun 2006 pada Kuadran I yaitu mempunyai nilai urbanisasi ekonomi yang tinggi dan faktor kondisi demografi yang tinggi. Adapun karakteristik wilayah pada Kuadran II yaitu mempunyai nilai urbanisasi demografi yang tinggi dan faktor kondisi demografi yang juga tinggi. Sedangkan wilayah Kuadran IV mempunyai nilai urbanisasi sosial yang tinggi dan faktor kondisi demografi yang tinggi.

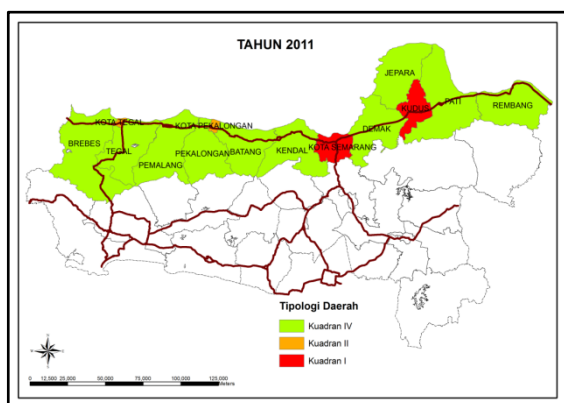


Sumber : Hasil analisis, 2015

GAMBAR 8
PETA TIPOLOGI DAERAH PANTURA JAWA TENGAH
TAHUN 2006

Hubungan tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah dapat dilihat pada wilayah Kuadran I yaitu pada Kota Semarang yang mempunyai pendapatan perkapita yang tinggi dan nilai gini rasio yang tinggi. Kota Semarang merupakan wilayah dengan pendapatan perkapita tertinggi kedua sebesar Rp. 18.132.799,- pada tahun 2006 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 30.566.980,-.

Adapun nilai gini rasio Kota Semarang merupakan nilai tertinggi sebesar 0,2923 pada tahun 2006 dan tertinggi kedua pada tahun 2011 sebesar 0,3545. Hal ini berarti peningkatan urbanisasi ekonomi menyebabkan peningkatan ketimpangan wilayah dalam distribusi pendapatan pada kota Semarang.



Sumber : Hasil analisis, 2015

GAMBAR 9
PETA TIPOLOGI DAERAH PANTURA JAWA TENGAH
TAHUN 2011

Karakteristik wilayah tahun 2011 pada Kuadran I yaitu mempunyai nilai urbanisasi ekonomi yang tinggi dan faktor sumber daya alam yang tinggi. Adapun karakteristik wilayah pada Kuadran II yaitu mempunyai nilai urbanisasi demografi yang tinggi dan faktor kondisi demografi yang juga tinggi. Sedangkan wilayah Kuadran IV mempunyai nilai urbanisasi sosial yang tinggi dan faktor sumber daya alam yang tinggi.

Hubungan tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah dapat dilihat pada wilayah Kuadran I yaitu pada Kabupaten Kudus yang mempunyai nilai nilai output industri bruto perkapita paling tinggi dan nilai pendapatan perkapita yang tinggi. Kabupaten Kudus merupakan wilayah dengan nilai output industri bruto perkapita paling tinggi di daerah Pantura Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 18.765.351,- pada tahun 2006 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 27.642.587,- pada tahun 2011.

Peningkatan nilai output industri bruto perkapita ini juga diikuti oleh peningkatan pendapatan perkapita Kabupaten Kudus sebesar Rp. 28.203.014,- pada tahun 2006 menjadi Rp. 42.941.164,- pada tahun 2011 yang merupakan nilai pendapatan perkapita paling tinggi di daerah Pantura Jawa Tengah. Hal ini berarti peningkatan urbanisasi ekonomi

menyebabkan ketimpangan pendapatan perkapita di daerah Pantura Jawa Tengah.

Hal ini sama dengan pendapat Wan et al (2015) yang menemukan bahwa urbanisasi ekonomi telah berkembang paling cepat di Huaibei dan mengalami peningkatan 91 kali lipat lebih tinggi dibandingkan urbanisasi lainnya. Nilai tingkat ketimpangan wilayah yang tinggi pada Kota Semarang dan Kabupaten Kudus membuktikan pendapat yang disampaikan oleh Li dan Wei (2010) bahwa kota merupakan komponen penting yang menyebabkan ketimpangan yang cukup besar antardaerah.

Kuadran I dan Kuadran IV menunjukkan hubungan antara urbanisasi dan ketimpangan wilayah berbanding lurus satu sama lain. Kota Semarang yang berada pada kuadran I mempunyai nilai tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah yang tinggi dengan nilai berada di atas rata-rata. Peningkatan nilai tingkat urbanisasi Kota Semarang sebesar 0,00687 diikuti oleh peningkatan nilai tingkat ketimpangan wilayah sebesar 0,08994. Sedangkan Kabupaten Rembang yang berada pada kuadran IV mempunyai nilai tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah yang rendah dengan nilai berada di bawah rata-rata. Penurunan nilai tingkat urbanisasi sebesar 0,0113 diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan wilayah sebesar 0,00567.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini terkait dengan urbanisasi dan ketimpangan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah yaitu:

1. Tingkat urbanisasi di daerah Pantura Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2006 dengan peningkatan tingkat urbanisasi paling besar dialami oleh Kota Semarang.
2. Urbanisasi ekonomi dan indikator rata-rata upah dari bekerja merupakan faktor pendorong terjadinya urbanisasi di daerah Pantura Jawa Tengah. Perbedaan rata-rata

upah dari bekerja pada wilayah daerah Pantura menyebabkan masyarakat berpindah dari rata-rata upah dari bekerja yang rendah ke rata-rata upah dari bekerja yang tinggi.

3. Tingkat ketimpangan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai 2011 dengan peningkatan paling tinggi di alami oleh Kota Semarang, sedangkan Kabupaten Kudus mengalami penurunan paling tinggi.
4. Faktor sumber daya alam dengan indikator proporsi sektor pertambangan dan penggalian merupakan faktor pendorong terjadinya tingkat ketimpangan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah. Sektor pertambangan dan penggalian bukan secara langsung mengakibatkan ketimpangan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah, namun memberikan gambaran bahwa perekonomian sebagian besar daerah Pantura Jawa Tengah bahwa masih bergantung pada sektor primer (masih bersifat agraris/radisional). Perbedaan sektor perekonomian juga akan menyebabkan perbedaan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita tiap daerah.
5. Hubungan antara tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah berbanding lurus yang berarti jika tingkat urbanisasi tinggi maka tingkat ketimpangan wilayah juga tinggi begitu juga sebaliknya yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Rembang.
6. Kota Semarang mempunyai hubungan tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah yang berbanding lurus dengan setiap peningkatan tingkat urbanisasi sebesar 1 maka ketimpangan wilayahnya akan mengalami peningkatan sebesar 13,09. Sedangkan penurunan tingkat urbanisasi sebesar 1 pada Kabupaten Rembang akan mengakibatkan penurunan tingkat ketimpangan wilayah sebesar 0,5.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan tingkat urbanisasi dan tingkat ketimpangan wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah yaitu:

1. Perlu adanya pemerataan pembangunan ekonomi di daerah Pantura Jawa Tengah. Pemerataan ini menyangkut dengan pendapatan dan standar hidup masyarakat. Urbanisasi ekonomi yang dominan di daerah Pantura Jawa Tengah memberikan gambaran bahwa alasan ekonomi menjadi faktor pendorong terjadinya urbanisasi dari wilayah dengan rata-rata upah dari bekerja (UMK) yang rendah ke wilayah dengan rata-rata upah dari bekerja yang tinggi. Perbedaan ini yang akan mengakibatkan ketimpangan antarwilayah yang tinggi.
2. Perlu adanya koordinasi pada kebijakan pembangunan perekonomian setiap wilayah dan antarwilayah. Ketimpangan wilayah merupakan masalah penting dalam kebijakan pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi wilayah tertentu akan menyebabkan terjadinya urbanisasi seperti di Kota Semarang. Kebijakan penyelesaian permasalahan urbanisasi dan ketimpangan wilayah diperlukan kebijakan yang sinkron dan sejalan. Pengembangan sektor sekunder dan sektor tersier di daerah Pantura Jawa Tengah sebaiknya berhubungan dengan perekonomian sebagian besar daerah Pantura Jawa Tengah yaitu sektor primer. Sektor primer pada Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak dan Kabupaten Rembang perlu dipertahankan dengan memberikan kebijakan yang dapat memberikan nilai tambah sehingga faktor input seperti tenaga kerja dan lahan tidak beralih ke sektor sekunder dan sektor tersier.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahrné, K et al. 2009. *Bumble bees (Bombus spp) along a gradient of increasing urbanization*. PLoS ONE, 4.
- BPS. 2011. *Jawa Tengah dalam Angka 2011*. Kantor Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- BPS. 2013. *Analisis Sosial Ekonomi Petani Di Jawa Tengah Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Sensus Pertanian 2013*. Kantor Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Dunford, M. 2009. *Regional inequalities. Socio-Economic Planning Sciences*, 44, 212-219.
- Esch, T et al. 2014. *Dimensioning urbanization—An advanced procedure for characterizing human settlement properties and patterns using spatial network analysis*. Applied Geography, 55, 212-228.
- Gibbs, J. P. 1966. *Measures of urbanization. Social Forces*, 45(2), 170–177.
- Gilbert, Alan dan Josef Gugler. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Henderson, Vernon. 2002. *"Urbanization in Developing Countries*. The World Bank Research Observer, 17(1), 89-112.
- Hsieh, S. C. 2014. *Analyzing urbanization data using rural–urban interaction and logistic growth model*. Computers, Environment and Urban Systems 45, 89-100.
- Li, Yingru dan Y.H. Dennis Wei. 2010. *The spatial-temporal hierarchy of regional inequality of China*. Applied Geography, 30, 303-316.
- McGee, T. G. 1971. *The Urbanization Process In The Third World*. London: G. Bell And Sons, Ltd.
- Mckay, A. 2002. *Defining and Measuring Inequality*. Briefing Paper, 1, 1-3.
- Novotny, J. 2007. *Measuring Regional Inequality: A Comparison of Coefficient of Variation and Hoover Concentration Index*. The Open Geography Journal, 2, 25-34.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi regional: teori dan aplikasi*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tisdale, H. 1942. *The Process of Urbanization. Social Forces*, 20 (3), 311–316.
- Wan, L et al. 2015. *Effects of urbanization on ecosystem service values in a mineralresource-based city*. Habitat International, 46, 54-63.
- Wang, S et al. 2014. *Exploring the relationship between urbanization and theeco-environment—A case study of Beijing–Tianjin–Hebei region*. Ecological Indicators, 45, 171-183.
- Yunus, Hadi Sabari. 2006. *Megapolitan: Konsep, Problematika, dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

